Sesuai Instruksi Presiden RI, Pemkab Pasuruan Siap Pantau Peniadaan Mudik Lebaran 1442 H

Selasa, 4 Mei 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengikuti rapat koordinasi virtual terkait pengendalian transportasi masa Idul Fitri 1442 H. Rapat ini membahas peniadaan mudik Lebaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memiliki alur komando yang jelas dalam menerapkan kebijakan larangan mudik dan bekerja sama dengan Satgas Covid-19, TNI, dan Polri dalam mengawasi dan melakukan penyekatan di titik-titik tertentu.

Menhub Budi Karya Sumadi menekankan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah tujuan pemudik terbesar dan potensi penyebaran Covid-19 melalui pemudik sangat tinggi. Ia juga menyampaikan bahwa peniadaan mudik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan tempat karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Indonesia. Peniadaan mudik diberlakukan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat. Pelaku perjalanan khusus/tertentu wajib menunjukkan surat ijin perjalanan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik Lebaran dan akan melakukan pemantauan secara ketat di wilayahnya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.